

PENGADILAN AGAMA BIMA

LAPORAN KEUANGAN

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2024 -
Unaudited**

Jl. Gatot Subroto No. 10

Telp. 0374-6191134

Mpunda, Kota Bima- Nusa Tenggara Barat



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA BIMA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 - Unaudited

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gatot Subroto No. 10

Telp. 0374-6191134

Mpunda, Kota Bima- Nusa Tenggara Barat

e-mail : info@pa-bima.go.id web : www.pa-bima.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Bima adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Bima. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bima, 24 Januari 2025
Pit. Kuasa Pengguna Anggaran,
Pit. Sekretaris,

Najir, S.Ag.
NIP. 197606072001121003

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca.....	6
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
A.1. Dasar Hukum.....	11
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bima	11
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	14
A.4. Basis Akuntansi	14
A.5. Dasar Pengukuran	15
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	24
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	24
B.2. Belanja	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
C.1. Aset Lancar.....	27
C.2. Aset Tetap	29
C.5. Kewajiban Jangka Pendek/Utang Kepada Pihak Ketiga	30
C.6. Ekuitas.....	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	32
D.2.....	32

Beban Pegawai.....	32
D.3. Beban Persediaan.....	32
D.4. Beban Barang dan Jasa.....	33
D.5. Beban Pemeliharaan	33
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	33
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	34
D.8. Beban Bantuan Sosial.....	34
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	35
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	35
D.11. Beban Lain-lain.....	35
D.12. Kegiatan Non Operasional.....	36
D.13. Pos Luar Biasa.....	36
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	37
E.1. Ekuitas Awal	37
E.2. Surplus (defisit) LO	37
E.1. Penyesuaian Nilai Aset	37
E.2. Koreksi Nilai Persediaan	37
E.3. Koreksi Aset Tetap.....	38
E.4. Koreksi atas Beban	38
E.5. Koreksi Lain-lain	38
E.6. Transaksi Antar Entitas.....	39
E.7. Kenaikan/Penurunan Ekuitas	39
E.8. Ekuitas Akhir	39
F. Pengungkapan Penting Lainnya	39
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	39
F.2. Pengungkapan Lain-lain	39
Laporan-laporan Pendukung.....	43
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	44
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember TA 2024 dan 2023	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2024 dan 2023	2
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	18
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	20
Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	21
Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2024	24
Tabel 7 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2024 dan 2023	24
Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024	25
Tabel 9 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024.....	25
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023	26
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023	26
Tabel 12 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023	27
Tabel 13 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2024 dan 2023	27
Tabel 14 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember TA 2024 dan 2023.....	28
Tabel 15. Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2024 dan 2023	28
Tabel 16. Rincian Aset Tetap.....	29
Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	30
Tabel 18. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023	31
Tabel 19. Rincian Realisasi PNBPN per 31 Desember 2024 dan 2023.....	32
Tabel 20. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023	32
Tabel 20. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023	33
Tabel 22. Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023.....	33
Tabel 23. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023	34
Tabel 24. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	34
Tabel 25. Rincian Beban Bantuan Sosial	34
Tabel 26. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	35
Tabel 27. Rincian Beban Piutang tak Tertagih.....	35
Tabel 28. Rincian Beban Lain-lain	36
Tabel 29. Rincian Kegiatan Non Operasional	36
Tabel 30. Rincian Pos Luar Biasa	36
Tabel 31. Rincian Penyesuaian Nilai Aset.....	37
Tabel 32. Rincian Koreksi Nilai Persediaan.....	38
Tabel 33. Rincian Koreksi atas Beban.....	38
Tabel 34. Rincian Koreksi Lain-lain.....	39

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

PENGADILAN AGAMA BIMA

Jl. Gatot Subroto No. 10 Mpunda, Kota Bima - Nusa Tenggara Barat

Telp. 0374-6191134 e-mail : info@pa-bima.go.id web : www.pa-bima.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bima, 24 Januari 2025
Pit. Kuasa Pengguna Anggaran,
Pit. Sekretaris,

Nafir, S.Ag.
NIP. 197606072001121003

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp173,848,500 atau mencapai 91.95 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp189,073,000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp251,700,000 atau mencapai 98.71 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp255,000,000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	189,073,000	173,848,500	91.95	171,954,000
Belanja Negara	255,000,000	251,700,000	98.71	234,350,000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2024 dan 2023.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp8,857,312 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp8,857,312; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyesihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp8,857,312, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp8,857,312 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp0.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	TA 2024	TA 2023	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	8,857,312	6,483,640	2,373,672	36.61
Aset Tetap	0	0	0	0.00
Aset Lainnya	0	0	0	0.00
Jumlah Aset	8,857,312	6,483,640	2,373,672	36.61
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	0	0	0	0.00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Kewajiban	0	0	0	0.00
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	8,857,312	6,483,640	2,373,672	36.61
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0.00
Jumlah Ekuitas Dana	8,857,312	6,483,640	2,373,672	36.61
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	8,857,312	6,483,640	2,373,672	36.61

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp173,848,500, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp257,646,328 sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(83,797,828), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus (defisit) sebesar Rp. 0 dan sebesar Rp. 0, sehingga entitas mengalami surplus (defisit) -LO sebesar Rp(83,797,828).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp6,483,640 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp(83,797,828) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas Rp86,171,500. Dengan kenaikan ekuitas sebesar Rp2,373,672 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp8,857,312.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2024, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA BIMA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2024			TA 2023
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	189,073,000	173,848,500	91.95	171,954,000
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah			189,073,000	173,848,500	91.95	171,954,000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	255,000,000	251,700,000	98.71	234,350,000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja Negara			255,000,000	251,700,000	98.71	234,350,000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA BIMA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2024	TA 2023
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	8,857,312	6,483,640
Jumlah Aset Lancar		8,857,312	6,483,640
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		8,857,312	6,483,640
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			

Ekuitas Dana Lancar

C.6

Ekuitas	C.6. 1.	8,857,312	6,483,640
Jumlah Ekuitas Dana		8,857,312	6,483,640
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		8,857,312	6,483,640



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA BIMA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	173,848,500	171,954,000
Jumlah Pendapatan		173,848,500	171,954,000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	20,946,328	22,219,724
Beban Barang dan Jasa	D. 4	97,500,000	96,000,000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	139,200,000	127,100,000
Beban Barang yang diserahkan kpd Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		257,646,328	245,319,724
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(83,797,828)	(73,365,724)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban jangka panjang		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Pos Luar Biasa			
Beban Luar Biasa	D. 13	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(83,797,828)	(73,365,724)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA BIMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas Awal	E. 1	6,483,640	11,581,724
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(83,797,828)	(73,365,724)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar			
Lain-lain			
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Koreksi Aset Tetap	E. 4	0	0
Koreksi Atas Beban	E. 5	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	86,171,500	68,267,640
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	2,373,672	(5,098,084)
Ekuitas Akhir		8,857,312	6,483,640

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 90/PMK.06/2014;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- q. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
- r. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- s. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bima

Visi Pengadilan Agama Bima adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Bima yang profesional dan modern dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Misi Pengadilan Agama Bima adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan Mahkamah Agung RI;
2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan;
3. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Bima yang profesional, integritas dan bertaqwa;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern, efektif dan efisien;
5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Bima melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Bidang Perkara

Peningkatan mutu pelayanan kepada pencari keadilan dalam menerima perkara, peningkatan proses persidangan pemeriksaan perkara, peningkatan kualitas putusan/penetapan, peningkatan mutu penyelesaian perkara, penyediaan layanan informasi mengenai jalannya tahapan-tahapan persidangan dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga bisa diakses secara umum demi terwujudnya keterbukaan informasi dalam bidang pelayanan penyelesaian perkara dengan mengembangkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

2. Bidang Pengawasan Internal

Meningkatkan mutu pengawasan terhadap perilaku dan kinerja hakim dan pejabat kepaniteraan baik yang bersifat rutin maupun insidentil, meningkatkan mutu pengawasan terhadap kinerja seluruh pegawai dan pejabat sekretariat baik yang bersifat rutin maupun insidentil.

3. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)/Kepegawaian

Meningkatkan mutu pelayanan dan kesejahteraan seluruh pegawai yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi dan mutasi, pemberian cuti, dan laporan kepegawaian

4. Bidang Pengelolaan Keuangan

Meningkatkan mutu perencanaan dan realisaasi dalam bidang Belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, dengan tetap berpegang kepada prinsip pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

5. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Meningkatkan mutu administrasi tata persuratan, meningkatkan mutu pengelolaan barang-barang inventaris kantor serta administrasi dan pemeliharaan, meningkatkan mutu kebersihan dan keamanan kantor, meningkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga lainnya.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Bima. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Bima adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya

penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tata Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp.173,848,500

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp173,848,500 atau mencapai 91.95 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp189,073,000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Bima adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan (425232)	0	0	0.00
Pendapatan Ongkos Perkara (425233)	72,200,000	64,705,000	89.62
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (425239)	116,873,000	109,143,500	93.39
Total Pendapatan	189,073,000	173,848,500	91.95

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1,894,500 atau 1.10% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah penerimaan perkara tahun 2024 yang berimbas dengan meningkatnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Agama Bima.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Ongkos Perkara	64,705,000	67,240,000	(2,535,000)	(3.77)
2.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	109,143,500	104,714,000	4,429,500	4.23
	Total Pendapatan	173,848,500	171,954,000	1,894,500	1.10

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp.
251,700,000

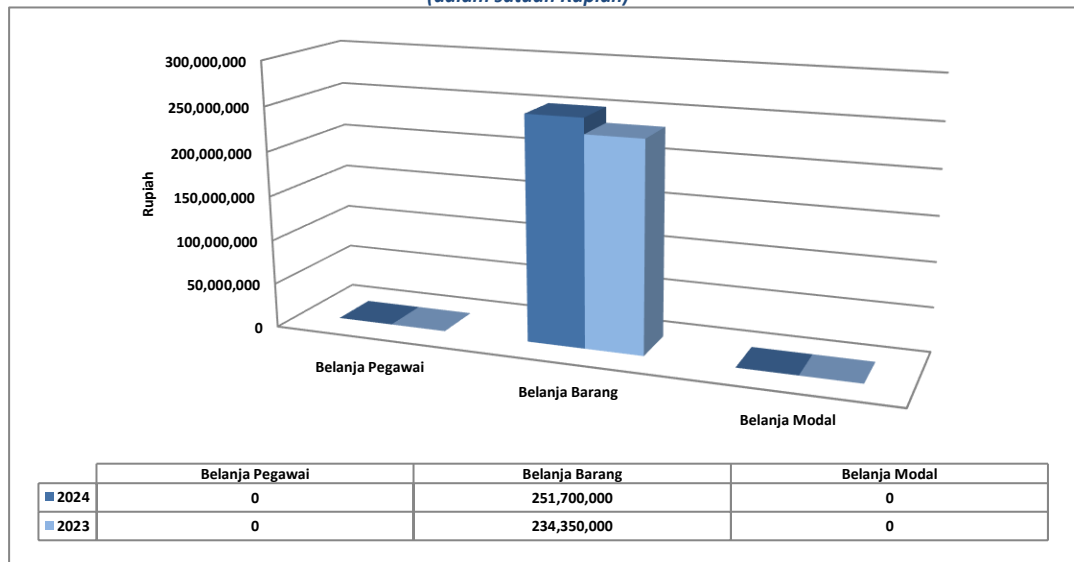
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Bima per 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp251,700,000 atau sebesar 98.71% dari anggaran senilai Rp255,000,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	255,000,000	251,700,000	98.71
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	255,000,000	251,700,000	98.71
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	255,000,000	251,700,000	98.71

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2024 & 2023

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp17,350,000 atau sebesar 7.40% dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena:

1. Meningkatnya pagu anggaran belanja barang persediaan dan belanja perjalanan dinas pada Pengadilan Agama Bima di tahun 2024.

Perbandingan realisasi belanja TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	251,700,000	234,350,000	17,350,000	7.40
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	251,700,000	234,350,000	17,350,000	7.40

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
251,700,000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Bima per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp251,700,000 dan Rp234,350,000.

Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 7.40% dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya pagu anggaran belanja barang persediaan dan belanja perjalanan dinas pada Pengadilan Agama Bima di tahun 2024.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Jasa	97,500,000	96,000,000	1,500,000	1.56
Belanja Barang Persediaan	15,000,000	11,250,000	3,750,000	33.33
Belanja Perjalanan Dinas	139,200,000	127,100,000	12,100,000	9.52
Total Belanja Brutto	251,700,000	234,350,000	17,350,000	7.40
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	251,700,000	234,350,000	17,350,000	7.40

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 8,857,312

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8,857,312 dan Rp6,483,640.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Bima per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 12 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Persediaan	8,857,312	6,483,640
Total Aset Lancar	8,857,312	6,483,640

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp.0

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Tabel 13 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Total	0	0

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas: Rp. 0*

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas adalah dalam bentuk uang titipan pihak ketiga/uang sisa panjar biaya perkara yang belum diambil oleh para pihak berperkara sampai pada akhir bulan Desember 2024.

Tabel 14 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Total	0	0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 8,857,312*

Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp8,857,312 dan Rp6,483,640. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
Persediaan	8,857,312	6,483,640
Total	8,857,312	6,483,640

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp.0 Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan
1	-	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 tidak ada perubahan nilai yakni sebesar Rp. 0.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya: Rp. 0

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi
dalam
Pengerjaan : Rp.
0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp. 0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	-	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek/Utang Kepada Pihak Ketiga

Kewajiban
Jangka Pendek
:
Rp.0

Nilai Kewajiban Jangka Pendek (utang kepada pihak ketiga) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu

kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 31 Desember TA 2024 tercatat sebesar Rp0.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Bima per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 18. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
Utang kepada Pihak Ketiga	0	0
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga :
Rp.0

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nominal Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 diperoleh dari saldo bank RPL yaitu uang titipan pihak ketiga/uang sisa panjar biaya perkara yang belum diambil oleh para pihak berperkara sampai dengan tanggal neraca. Utang kepada Pihak Ketiga adalah akun pasangan dari Kas Lainnya dan Setara Kas yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN:
Rp.0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Ekuitas:
Rp. 8,857,312

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8,857,312 dan Rp6,483,640. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP : Rp.
173,848,500

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp173,848,500 dan Rp171,954,000. Naik sebesar Rp1,894,500 atau 1.10%. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 19. Rincian Realisasi PNBP per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023	%
1	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	0	0
2	Pendapatan Ongkos Perkara	64,705,000	67,240,000	(3.77)
3	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	109,143,500	104,714,000	4.23
Total Pendapatan		173,848,500	171,954,000	1.10

D.2. Beban Pegawai

Tidak ada beban pegawai untuk satuan kerja 309113.

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan :
Rp. 20,946,328

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20,946,328 dan Rp22,219,724. Turun Rp(1,273,396) atau (5.73)% dari tahun 2023. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan	20,946,328	22,219,724	(1,273,396)	(5.73)
Total Beban Persediaan	20,946,328	22,219,724	(1,273,396)	(5.73)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
& Jasa :
Rp. 97,500,000*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp97,500,000 dan Rp96,000,000. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Barang dan Jasa	97,500,000	96,000,000	1,500,000	1.56
Total Beban Barang dan Jasa	97,500,000	96,000,000	1,500,000	1.56

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp. 0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
139,200,000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp139,200,000 dan Rp127,100,000. Beban ini mengalami kenaikan sebesar 9.52% dari tahun sebelumnya. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Dinas	139,200,000	127,100,000	12,100,000	9.52
Total Beban Perjalanan Dinas	139,200,000	127,100,000	12,100,000	9.52

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp. 0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
	0	0	0	
Beban Barang untuk Diserahkan Masyarakat	0	0	0	

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan
Sosial : Rp. 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp. 0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp. 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain
: Rp. 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 28. Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp.0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 29. Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp.0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 30. Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar
Rp. 6,483,640 Rp6,483,640 dan Rp11,581,724.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
Rp.(83,797,828) adalah sebesar Rp(83,797,828) dan Rp(73,365,724). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Untuk tahun 2024 mengalami kenaikan Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(10,432,104) dari tahun 2023.

E.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset : Penyesuaian Nilai Aset merupakan penyesuaian nilai aset yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 31. Rincian Penyesuaian Nilai Aset
per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Penyesuaian Nilai aset	0
Total Penyesuaian Nilai aset	0

E.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan : Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 32. Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3. Koreksi Aset Tetap

*Koreksi Aset
Tetap : Rp. 0*

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

E.4. Koreksi atas Beban

*Koreksi Aset
Beban : Rp 0*

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 33. Rincian Koreksi atas Beban
per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi atas Beban	0
Total Koreksi atas beban	0

E.5. Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-
lain : Rp 0*

Koreksi Lain-Lain merupakan koreksi yang tidak termasuk dalam poin koreksi yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi Lain-lain	0
Total Koreksi Lain-lain	0

E.6. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas:
Rp. 86,171,500

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp86,171,500 dan Rp68,267,640 yang berarti terdapat kenaikan sebesar Rp17,903,860 dari tahun 2023.

E.7. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penu-
runan Ekuitas:
Rp. 2,373,672

Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2,373,672 dan Rp(5,098,084) yang berarti terdapat kenaikan sebesar Rp7,471,756 dari tahun 2024.

E.8. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir :
Rp. 8,857,312

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8,857,312 dan Rp6,483,640 yang berarti terdapat kenaikan sebesar Rp2,373,672 dari tahun 2023.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Capaian Output

Dalam rangka mewujudkan belanja yang lebih berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*), telah ditetapkan petunjuk teknis oleh Kementerian Keuangan yang dapat memberikan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini menunjukkan

tingkat urgensi dari pelaporan capaian output dalam proses pengelolaan keuangan negara. Output ini akan dapat menjawab pertanyaan utama pelaksanaan keuangan negara yaitu kemana dan untuk apa uang yang telah dikeluarkan. Dengan pelaporan capaian output dapat diketahui apakah program dan kegiatan pemerintah yang telah ditetapkan telah terlaksana dan mencapai sasaran. Hal ini menjadi penting sebagai Langkah antisipasi agar setiap target output dapat tercapai pada akhir periode, serta sebagai langkah evaluasi untuk merumuskan kebijakan di masa mendatang.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi yaitu pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan. Adapun Fungsi Pengadilan Agama Bima adalah Ketertiban dan Keamanan, dengan sub fungsi Peradilan, dimana setiap satuan kerja tersebut memiliki satu program yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 pada satuan kerja Pengadilan Agama Bima antara lain sebagai berikut:

Kegiatan/ Rincian Output	Belanja			Keluaran				Ket
	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
Nama Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama								
Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	96,000,000	96,000,000	100.00	1,150	1,161	Orang	100.00	
Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	75,000,000	75,000,000	100.00	120	152	Perkara	100.00	
Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	84,000,000	80,700,000	96.07	200	204	Perkara	100.00	
TOTAL	255,000,000	251,700,000	98.71	1,470	1,517		100.00	

Adapun rincian capaian output per satuan kerja dapat dilihat pada dokumen lampiran.

F.2.2. Capaian Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Pengadilan Agama Bima terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) VII – Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pelaksanaannya di antaranya melalui Penegakan Hukum Nasional, dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu Pos Bantuan Hukum, Pembebasan Biaya Perkara, dan Sidang Keliling dengan pagu mencapai Rp255,000,000 dan realisasi sebesar Rp 251,700,000 dengan rincian sebagai berikut:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	96,000,000	96,000,000	100.00	Orang	1,150	1,161	100.00
Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	75,000,000	75,000,000	100.00	Perkara	120	152	100.00
Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	84,000,000	80,700,000	96.07	Perkara	200	204	100.00
TOTAL	255,000,000	251,700,000	98.71		1,470	1,517	100.00

F.2.3. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak Ada Pemeriksaan BPK untuk Satker Pengadilan Agama Bima TA 2024.

F.2.4. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak ada informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual untuk periode pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2024.

F.2.5. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Bima adalah:

1. BRI Virtual Account Nomor 651543091131000 Nama Rekening BPG 071 PA BIMA 04, Nomor Izin 000218/071 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0.
2. BSI Kantor Cabang Bima Nomor Rekening 7261759467 Nama Rekening RPL 071 PS PA BIMA BIAYA PERKARA Nomor Izin 000291 tanggal 5 Maret 2024 yang digunakan sebagai Penampung biaya perkara Pengadilan Agama Bima dengan saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp 153,481,416.
3. BRI Kantor Cabang Bima A/C 0079-01-000445-30-0 a.n. RPL 071 PA BIMA UTK PDT BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung biaya perkara Pengadilan Agama Bima ditutup per tanggal 15 Februari 2024.
4. BRI Kantor Cabang Bima A/C 007901001727307 a.n. RPL 071 PS PA BIMA UNTUK PANJAR BP yang digunakan sebagai penampung sementara panjar biaya perkara Pengadilan Agama Bima telah ditutup per tanggal 22 Februari 2024.

F.2.6. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

F.2.7. Revisi DIPA

Untuk periode pelaporan keuangan per 31 Desember Tahun 2024 Pengadilan Agama Bima melakukan 4 (empat) kali Revisi DIPA, DIPA-005.04.2.309113/2024 tanggal 13 Februari 2024, 19 April 2024, 9 Juli 2024, dan 8 Oktober 2024 terkait dengan Revisi Data Halaman III DIPA.

F.2.8. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB untuk periode pelaporan keuangan TA 2024 kali ini.

F.2.9. Catatan Penting Lainnya

Untuk Periode pelaporan keuangan per 31 Desember Tahun 2024 tidak terdapat catatan penting lainnya.

LAPORAN PENDUKUNG

LAMPIRAN A.1

PENYUSUTAN ASET TETAP

LAMPIRAN A.1
RINCIAN PENYUSUTAN ASET TETAP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Bima, 24 Januari 2025
 Plt. Kuasa Pengguna Anggaran,
 Plt. Sekretaris,

Najir, S.Ag.
 NIP. 197606072001121003

LAMPIRAN A.2

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

LAMPIRAN A.2
DAFTAR KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024

No.	URAIAN AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	JUMLAH S.D 1 JANUARI 2024	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Bima, 24 Januari 2025
 Plt. Kuasa Pengguna Anggaran,
 Plt. Sekretaris,

Najir, S.Ag.
 NIP. 197606072001121003

LAMPIRAN A.3

HIBAH

LAMPIRAN A.3
DAFTAR HIBAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Bima, 24 Januari 2025
 Plt. Kuasa Pengguna Anggaran,
 Plt. Sekretaris,

Najir, S.Ag.
 NIP. 197606072001121003

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN TA 2024

Kode dan Nama UAKPA : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA
Kode dan Nama UAPPAW: (00KD) NUSA TENGGARA BARAT
Kode dan Nama Eselon I : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Kode dan Nama K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN		
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	V	Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>	V	Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	V	Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrua! Saldo Awal	V	Ada
2. Neraca Percobaan Akrua!	V	Ada
3. Neraca Percobaan Kas	V	Ada
4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V	Ada
KESESUAIAN LAPORAN DENGAN SAKTI/ MonSAKTI		
Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak Seharusnya
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan Aplikasi Sakti/Monsakti termasuk perbandingan dengan tahun 2021?	V	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/ MonSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>		
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI		
Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak Seharusnya
1. Nilai "Surplus/ (Defisit)-LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	V	Sama
2. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca	V	Sama
3. Neraca: Aset = Kewajiban + Ekuitas	#N/A	#N/A Sama
PENGECHEKAN PADA MonSAKTI		
To Do List	Ada	Tidak Seharusnya
1. Terdapat Pagu Minus per tanggal pelaporan		V Tidak
2. Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		V Tidak
3. Terdapat Persediaan belum Didetilkkan per tanggal pelaporan		V Tidak
4. Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V Tidak
5. Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah dan CaLK)		V Tidak
6. Terdapat Aset Belum Didetilkkan per tanggal pelaporan		V Tidak
7. Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V Tidak
8. Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V Tidak
9. Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V Tidak
10. Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		V Tidak
11. Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V Tidak

12. Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah dan CaLK</i>			
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah "TDK RUPIAH" Yang BEDA?		V	Tidak
2. Adakah "TDK COA" Yang BEDA?		V	Tidak
3. Adakah "TDK Detail" Yang BEDA?		V	Tidak
a. Pagu/DIPA		V	Tidak
b. Estimasi PNBP		V	Tidak
c. Belanja		V	Tidak
d. Pengembalian Belanja		V	Tidak
e. Pendapatan		V	Tidak
f. Pengembalian Pendapatan		V	Tidak
g. Kas BLU		V	Tidak
h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
i. Kas Hibah		V	Tidak
j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
Rekon Internal	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak

Daftar MonSAKTI		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika Ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		V	Ada/Tidak
2.	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		V	Ada/Tidak
3.	Adakah Neraca Tidak Balance		V	Tidak
4.	Adakah Pagu Minus		V	Tidak
5.	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi		V	Tidak
6.	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
Pengecekan Saldo Neraca Percobaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		V	Tidak
2.	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3.	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2.	Akun Penyisihan Piutang (116XXX) dan Akumulasi Penyusutan (137XXX dan 169XXX) bersaldo (K)	V		Ya
3.	Akun Kewajiban (2XXXXX) bersaldo (K)	V		Ya
4.	Akun Pendapatan (4XXXXX) bersaldo (K)	V		Ya
5.	Akun Pengembalian Pendapatan (4XXXXX) bersaldo (D)	V		Ya
6.	Akun Belanja/Beban (5XXXXX) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7.	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5XXXXX) bersaldo (K)	V		Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Tidak
2.	Terdapat Akun 1111XX hingga 1115XX. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116XX hingga 1119XX, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3.	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4.	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5.	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6.	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7.	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8.	Terdapat Akun 41XXXX/43XXXX (Pendapatan Perpajakan/Hibah)		V	Tidak
9.	Terdapat Akun 421XXX/422XXX/423XXX dan 425XXX KHUSUS BUN		V	Tidak
10.	Terdapat Akun 425XXX Khusus BUN (425143/ 144/ 161/ 162/ 719/ 745/ 772/ 773/ 774/ 815/ 816/ 998)		V	Tidak
11.	Terdapat Akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/ Subsidi/ Hibah/ Lain-lain/ Transfer TAYL)		V	Tidak
12.	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/ Subsidi/ Hibah/ Lain-lain)		V	Tidak
13.	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
Jika Bukan Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya

1.	Terdapat Akun Neraca (1XXXXX dan 2XXXXX) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2.	Terdapat Akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3.	Terdapat Akun 525XXX (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4.	Terdapat Akun 537XXX (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
Terkait Satker BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		N/A	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		N/A	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai tusi? Misalnya ada persediaan/ realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/ Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah / Bantuan Sosial		V	Tidak
2.	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya, kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
Hibah Langsung		Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung Uang/Barang/Jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			V	Ada/Tidak
1.	Adakah akun 218211 (Hibah Langsung yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		N/A	Ada/Tidak
2.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan Saldo Awal)		N/A	Ada/Tidak
3.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan akun 391133 - Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		N/A	Ya
4.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		N/A	Ya
5.	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung yang Belum Disahkan)?		N/A	Ya
Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			N/A	Ada/Tidak
1.	Pengesahan Pendapatan Hibah (424XXX) jika Hibah Uang		N/A	Ya
Transfer Masuk/ Transfer Keluar dan Resiprokal		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MonSAKTI	0		
2.	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurangi TM di Neraca Percobaan)	0		
3.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah terdapat akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2.	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		N/A	Ya/Tidak
3.	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di Neraca Percobaan Akrua?		N/A	Ya
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya

1.	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal)		N/A	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan dalam CaLK terkait koreksi persediaan serta dicantumkan dalam catatan telaah.		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
Pengecekan Pos-pos Neraca		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2.	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5.	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau deposito	V		Ya
6.	Dari kolom perbandingan, adakah kenaikan/ penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7.	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8.	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos-pos LO		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat pendapatan perpajakan (Kecuali K/L 015)		V	Tidak
2.	Terdapat pendapatan hibah (43XXXX), beban pembayaran kewajiban utang (54XXXX), beban subsidi (55XXXX), beban hibah (56XXXX), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6XXXXX), atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		V	Tidak
3.	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4.	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5.	Bandingkan dengan Laporan Operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/ penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6.	Surplus/ defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7.	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/ Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2.	Terdapat kenaikan/ penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3.	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		V	Tidak
4.	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	V		Ya
Contoh: Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST				

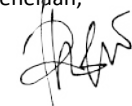
2.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2.	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3.	Terdapat pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4.	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5.	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	V		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Ada Akun Piutang/Piutang TP/ Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/ Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		N/A	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		N/A	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		N/A	Ya/Tidak
2.	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		N/A	Ya/Tidak
3.	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4.	Ada Aset Tetap/ Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	V		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		N/A	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/ Amortisasi (di LO)		N/A	Ya/Tidak
5.	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?		V	Ya/Tidak
	- Jika ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		N/A	Ya
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya
2.	Apakah ada Beban Bansos?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika, ada, Karwas dan/atau Memo harus ditatausahakan)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		V	Ya/Tidak
2.	Ada realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		V	Ya/Tidak
	- Maka ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual		N/A	Ya/Tidak
3.	Ada akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		V	Ya/Tidak
4.	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		V	Ya/Tidak
	- Maka ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual		V	Ya/Tidak
5.	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual		V	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
LPSAL BLU		Ya	Tidak	Seharusnya

1.	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		N/A	Ya
2.	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		N/A	Tidak
3.	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?		N/A	Ya
4.	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaL BLU?		N/A	Ya
5.	Apakah Nilai SiLPA, SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(Defisit) pada LRA		N/A	Ya
6.	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU?		N/A	Ya
LAK BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119XX, 111826, 1133XX, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaL BLU?		N/A	Ya
2.	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?		N/A	Ya
3.	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		N/A	Ya
4.	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU		N/A	Ya
5.	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca		N/A	Ya
6.	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		N/A	Ya
7.	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo Akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU		N/A	Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"</i>				

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

(NAJIR S.Ag.)
NIP. 197606072001121003

Bima, 24 Januari 2025

Penelaah,

(REZKY PUSPITARANI, S.E., S.H.)
NIP. 199404032020122016

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA BIMA 309113

Tgl Data : 13/02/25 7:04 AM
Tgl Cetak : 14/02/25 7:23 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	189,073,000	173,848,500	(15,224,500)	92	207,606,000	171,954,000	35,652,000	83
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	189,073,000	173,848,500	(15,224,500)	92	207,606,000	171,954,000	35,652,000	83
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	189,073,000	173,848,500	(15,224,500)	92	207,606,000	171,954,000	35,652,000	83
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	255,000,000	251,700,000	(3,300,000)	99	241,000,000	234,350,000	6,650,000	97
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	255,000,000	251,700,000	(3,300,000)	99	241,000,000	234,350,000	6,650,000	97
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA BIMA 309113

Tgl Data : 13/02/25 7:04 AM
Tgl Cetak : 14/02/25 7:23 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	255,000,000	251,700,000	(3,300,000)	99	241,000,000	234,350,000	6,650,000	97
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

KOTA BIMA, 14 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAJIR
NIP 197606072001121003

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ESELON I

WILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

: 005

: 04

: 2300

: 309113

MAHKAMAH AGUNG

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

NUSA TENGGARA BARAT

PENGADILAN AGAMA BIMA

Kode Lap : LRA.P.E1.1

Tanggal : 14/02/25 7:34 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	72,200,000	64,705,000	0	64,705,000	89.62
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	116,873,000	109,143,500	0	109,143,500	93.39
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	189,073,000	173,848,500	0	173,848,500	91.95
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	189,073,000	173,848,500	0	173,848,500	91.95
	JUMLAH PENDAPATAN	189,073,000	173,848,500	0	173,848,500	91.95

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 04 **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**
WILAYAH/PROVINSI : 2300 **NUSA TENGGARA BARAT**
SATUAN KERJA : 309113 **PENGADILAN AGAMA BIMA**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 14/02/25 7:33 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 13/2/25 12:06 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	96,000,000	96,000,000	96,000,000	0	96,000,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	97,500,000	97,500,000	97,500,000	0	97,500,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	134,700,000	134,700,000	134,700,000	0	134,700,000	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	139,200,000	139,200,000	139,200,000	0	139,200,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	255,000,000	255,000,000	251,700,000	0	251,700,000	98.71	3,300,000
	JUMLAH BELANJA	255,000,000	255,000,000	251,700,000	0	251,700,000	98.71	3,300,000

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 13/02/25 7:04 AM

Tgl Cetak : 14/02/25 7:22 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	173,848,500	171,954,000	1,894,500	1.102
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	173,848,500	171,954,000	1,894,500	1.102
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	173,848,500	171,954,000	1,894,500	1.102
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	20,946,328	22,219,724	(1,273,396)	(5.731)
Beban Barang dan Jasa	97,500,000	96,000,000	1,500,000	1.562
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	139,200,000	127,100,000	12,100,000	9.52
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



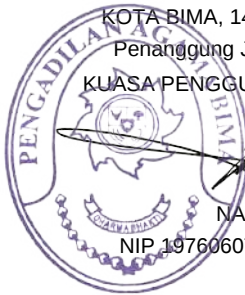
KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 13/02/25 7:04 AM
Tgl Cetak : 14/02/25 7:22 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	257,646,328	245,319,724	12,326,604	5.025
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(83,797,828)	(73,365,724)	(10,432,104)	14.219
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(83,797,828)	(73,365,724)	(10,432,104)	14.219
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(83,797,828)	(73,365,724)	(10,432,104)	14.219

Keterangan :
FINAL

KOTA BIMA, 14 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



NAJIR
NIP. 197606072001121003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 14/02/25 12:32 PM
Tgl Cetak : 14/02/25 7:24 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	8,857,312	6,483,640	2,373,672	36.61
JUMLAH ASET LANCAR	8,857,312	6,483,640	2,373,672	36.61
JUMLAH ASET	8,857,312	6,483,640	2,373,672	36.61

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	8,857,312	6,483,640	2,373,672	36.61
JUMLAH EKUITAS	8,857,312	6,483,640	2,373,672	36.61
JUMLAH EKUITAS	8,857,312	6,483,640	2,373,672	36.61
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8,857,312	6,483,640	2,373,672	36.61

Keterangan :
FINAL

KOTA BIMA, 14 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAJIR
NIP. 197606072001121003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 14/02/25 12:32 PM
Tgl Cetak : 14/02/25 7:23 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	6,483,640	11,581,724	(5,098,084)	(44.02)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(83,797,828)	(73,365,724)	(10,432,104)	14.22
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	86,171,500	68,267,640	17,903,860	26.23
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2,373,672	(5,098,084)	7,471,756	(146.56)
EKUITAS AKHIR	8,857,312	6,483,640	2,373,672	36.61

Keterangan :
FINAL

KOTA BIMA, 14 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAJIR
NIP 197606072001121003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 13/02/25 7:04 AM
Tgl Cetak : 14/02/25 7:24 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	8,857,312	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	251,700,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	173,848,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	8,320,000
0.0	391111	Ekuitas	0	6,483,640
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	64,705,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	109,143,500
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	96,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,500,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	134,700,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	20,946,328	0
JUMLAH			440,352,140	440,352,140

Keterangan :
FINAL

KOTA BIMA, 14 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAJIR
NIP 197606072001121003



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 14/02/25 12:32 PM
Tgl Cetak : 14/02/25 7:25 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	251,700,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	173,848,500	0
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	64,705,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	109,143,500
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	15,000,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	96,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,500,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	134,700,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	0
JUMLAH			425,548,500	425,548,500

Keterangan :
FINAL

KOTA BIMA, 14 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 309113 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl.Data : 14/02/25 6:32 PM
Tgl.Cetak : 14/02/25 7:34 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	8,857,312
J U M L A H		8,857,312

KOTA BIMA, 14 Februari 2025
Peranggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

NAJIR
197606072001121003

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2024(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 309113 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tanggal : 14/02/25 7:35 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	6,483,640
J U M L A H		6,483,640

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 309113 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 14/02/25 6:32 PM
Tgl Cetak : 14/02/25 7:35 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KOTA BIMA, 14 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



NAJR
197606072001121003

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 309113 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 03/03/24 12:00 AM
Tgl Cetak : 14/02/25 7:36 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KOTA BIMA, 14 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG


NAJIR
197606072001121003

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 309113 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 14/02/25 6:32 PM
Tgl Cetak : 14/02/25 7:44 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

KOTA BIMA, 14 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



NADIR
197606072001121003

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 309113 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 14/02/25 6:32 PM
Tgl Cetak : 14/02/25 7:38 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

KOTA BIMA, 14 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

NAJIR
197606072001121003



LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 309113 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 14/02/25 6:32 PM
Tanggal : 14/02/25 7:38 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8,857,312
Jumlah Barang Konsumsi		8,857,312
TOTAL		8,857,312

Keterangan :
1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 309113
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	255,000,000	255,000,000	0
2	Belanja	251,700,000	251,700,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	189,073,000	189,073,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	173,848,500	173,848,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21-JAN-25



BUKU BESAR SAI
 TINGKAT SATUAN KERJA
 PEMBUKUAN DASAR AKRUAL
 PER 1 JANUARI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : BBSAIS
 Tanggal : 04-01-2025
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON 1 :04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 WILAYAH/PROVINSI :2300 Pengadilan Tinggi Agama Mataram
 SATUAN KERJA :309113 PENGADILAN AGAMA BIMA
 JENIS KEWENANGAN :KD Kantor Daerah

BUKU BESAR 111825 Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

TGL JNL	TGL DOK	KD BUKU BESAR	NO DOK	BAESWILSATK	KPPN	DEBET	KREDIT	SALDO	TIPE JURNAL
		SALDO		005042300		0	0	0	
01-01-24	01-01-24	GLP-309113-264849228	B001	005042300309113	071	73,414,716	0	73,414,716	Baru
01-01-24	01-01-24	GLP-309113-264849228	B001	005042300309113	071	0	73,414,716	0	Balik
02-01-24	02-01-24	GLP-309113-265886135	B001	005042300309113	071	73,414,716	0	73,414,716	Baru
31-01-24	31-01-24	BEN-309113-304039055	00007/PKB/309113/2024	005042300309113	071	225,459,500	0	298,874,216	Baru
31-01-24	31-01-24	BEN-309113-304042162	00008/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	200,000,000	98,874,216	Baru
31-01-24	31-01-24	BEN-309113-304039055	00007/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	225,459,500	126,585,284	Balik
31-01-24	31-01-24	BEN-309113-304042162	00008/PKB/309113/2024	005042300309113	071	200,000,000	0	73,414,716	Balik
31-01-24	31-01-24	BEN-309113-304921497	00010/PKB/309113/2024	005042300309113	071	225,459,500	0	298,874,216	Baru
31-01-24	31-01-24	BEN-309113-304923396	00011/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	200,000,000	98,874,216	Baru
31-01-24	31-01-24	BEN-309113-304921497	00010/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	225,459,500	126,585,284	Balik
31-01-24	31-01-24	BEN-309113-305790478	00010/PKB/309113/2024	005042300309113	071	225,459,500	0	98,874,216	Baru
31-01-24	31-01-24	BEN-309113-304923396	00011/PKB/309113/2024	005042300309113	071	200,000,000	0	298,874,216	Balik
31-01-24	31-01-24	BEN-309113-305791233	00011/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	200,000,000	98,874,216	Baru
15-02-24	15-02-24	BEN-309113-305082449	00014/PKB/309113/2024	005042300309113	071	46,760,000	0	145,634,216	Baru
15-02-24	15-02-24	BEN-309113-305083131	00015/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	145,634,216	0	Baru
15-02-24	15-02-24	BEN-309113-305082449	00014/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	46,760,000	46,760,000	Balik
15-02-24	15-02-24	BEN-309113-305791684	00014/PKB/309113/2024	005042300309113	071	46,760,000	0	0	Baru
15-02-24	15-02-24	BEN-309113-305083131	00015/PKB/309113/2024	005042300309113	071	145,634,216	0	145,634,216	Balik
15-02-24	15-02-24	BEN-309113-305791979	00015/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	145,634,216	0	Baru
21-02-24	21-02-24	BEN-309113-304908588	00009/PKB/309113/2024	005042300309113	071	3,640,000	0	3,640,000	Baru
21-02-24	21-02-24	BEN-309113-304908588	00009/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	3,640,000	0	Balik
21-02-24	21-02-24	BEN-309113-304930743	00012/PKB/309113/2024	005042300309113	071	3,640,000	0	3,640,000	Baru
21-02-24	21-02-24	BEN-309113-304933423	00013/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	95,634,216	91,994,216	Baru
21-02-24	21-02-24	BEN-309113-304933423	00013/PKB/309113/2024	005042300309113	071	95,634,216	0	3,640,000	Balik
21-02-24	21-02-24	BEN-309113-304930743	00012/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	3,640,000	0	Balik
29-02-24	29-02-24	BEN-309113-302260090	00001/PKB/309113/2024	005042300309113	071	172,748,000	0	172,748,000	Baru
29-02-24	29-02-24	BEN-309113-302260360	00002/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	50,110,000	122,638,000	Baru
29-02-24	29-02-24	BEN-309113-302260090	00001/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	172,748,000	50,110,000	Balik
29-02-24	29-02-24	BEN-309113-302260360	00002/PKB/309113/2024	005042300309113	071	50,110,000	0	0	Balik
29-02-24	29-02-24	BEN-309113-305087470	00016/PKB/309113/2024	005042300309113	071	172,748,000	0	172,748,000	Baru
29-02-24	29-02-24	BEN-309113-305088870	00017/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	50,110,000	122,638,000	Baru
29-02-24	29-02-24	BEN-309113-305087470	00016/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	172,748,000	50,110,000	Balik
29-02-24	29-02-24	BEN-309113-305792298	00016/PKB/309113/2024	005042300309113	071	172,748,000	0	122,638,000	Baru
29-02-24	29-02-24	BEN-309113-305088870	00017/PKB/309113/2024	005042300309113	071	50,110,000	0	172,748,000	Balik
29-02-24	29-02-24	BEN-309113-305793808	00017/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	50,110,000	122,638,000	Baru
31-03-24	31-03-24	BEN-309113-302260810	00003/PKB/309113/2024	005042300309113	071	97,546,000	0	220,184,000	Baru

BUKU BESAR SAI
TINGKAT SATUAN KERJA
PEMBUKUAN DASAR AKRUAL
PER 1 JANUARI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : BBSAIS
Tanggal : 04-01-2025
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :005

MAHKAMAH AGUNG

ESELON 1 :04

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI :2300

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

SATUAN KERJA :309113

PENGADILAN AGAMA BIMA

JENIS KEWENANGAN :KD

Kantor Daerah

BUKU BESAR 111825 Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

TGL JNL	TGL DOK	KD BUKU BESAR	NO DOK	BAESWILSATK	KPPN	DEBET	KREDIT	SALDO	TIPE JURNAL
31-03-24	31-03-24	BEN-309113-302260948	00004/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	120,015,000	100,169,000	Baru
31-03-24	31-03-24	BEN-309113-302260810	00003/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	97,546,000	2,623,000	Balik
31-03-24	31-03-24	BEN-309113-302260948	00004/PKB/309113/2024	005042300309113	071	120,015,000	0	122,638,000	Balik
31-03-24	31-03-24	BEN-309113-305091039	00018/PKB/309113/2024	005042300309113	071	78,090,500	0	200,728,500	Baru
31-03-24	31-03-24	BEN-309113-305093353	00019/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	97,546,000	103,182,500	Baru
31-03-24	31-03-24	BEN-309113-305091039	00018/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	78,090,500	25,092,000	Balik
31-03-24	31-03-24	BEN-309113-305111908	00018/PKB/309113/2024	005042300309113	071	97,546,000	0	122,638,000	Baru
31-03-24	31-03-24	BEN-309113-305093353	00019/PKB/309113/2024	005042300309113	071	97,546,000	0	220,184,000	Balik
31-03-24	31-03-24	BEN-309113-305113844	00019/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	120,015,000	100,169,000	Baru
31-03-24	31-03-24	BEN-309113-305111908	00018/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	97,546,000	2,623,000	Balik
31-03-24	31-03-24	BEN-309113-305796234	00018/PKB/309113/2024	005042300309113	071	97,546,000	0	100,169,000	Baru
31-03-24	31-03-24	BEN-309113-305113844	00019/PKB/309113/2024	005042300309113	071	120,015,000	0	220,184,000	Balik
31-03-24	31-03-24	BEN-309113-305797640	00019/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	120,015,000	100,169,000	Baru
30-04-24	30-04-24	BEN-309113-302261526	00006/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	110,015,000	9,846,000	Baru
30-04-24	30-04-24	BEN-309113-302261431	00005/PKB/309113/2024	005042300309113	071	88,497,500	0	78,651,500	Baru
30-04-24	30-04-24	BEN-309113-302261526	00006/PKB/309113/2024	005042300309113	071	110,015,000	0	188,666,500	Balik
30-04-24	30-04-24	BEN-309113-302262282	00006/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	110,015,000	78,651,500	Baru
30-04-24	30-04-24	BEN-309113-302261431	00005/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	88,497,500	9,846,000	Balik
30-04-24	30-04-24	BEN-309113-302262363	00005/PKB/309113/2024	005042300309113	071	88,497,500	0	78,651,500	Baru
30-04-24	30-04-24	BEN-309113-302262363	00005/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	88,497,500	9,846,000	Balik
30-04-24	30-04-24	BEN-309113-302262934	00005/PKB/309113/2024	005042300309113	071	88,497,500	0	78,651,500	Baru
30-04-24	30-04-24	BEN-309113-302262282	00006/PKB/309113/2024	005042300309113	071	110,015,000	0	188,666,500	Balik
30-04-24	30-04-24	BEN-309113-302262934	00005/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	88,497,500	100,169,000	Balik
30-04-24	30-04-24	BEN-309113-305117780	00020/PKB/309113/2024	005042300309113	071	88,497,500	0	188,666,500	Baru
30-04-24	30-04-24	BEN-309113-305118720	00021/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	110,015,000	78,651,500	Baru
30-04-24	30-04-24	BEN-309113-305117780	00020/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	88,497,500	9,846,000	Balik
30-04-24	30-04-24	BEN-309113-305798657	00020/PKB/309113/2024	005042300309113	071	88,497,500	0	78,651,500	Baru
30-04-24	30-04-24	BEN-309113-305118720	00021/PKB/309113/2024	005042300309113	071	110,015,000	0	188,666,500	Balik
30-04-24	30-04-24	BEN-309113-305798874	00021/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	110,015,000	78,651,500	Baru
31-05-24	31-05-24	BEN-309113-307752706	00022/PKB/309113/2024	005042300309113	071	150,125,000	0	228,776,500	Baru
31-05-24	31-05-24	BEN-309113-307752706	00022/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	150,125,000	78,651,500	Balik
31-05-24	31-05-24	BEN-309113-307753382	00022/PKB/309113/2024	005042300309113	071	143,662,500	0	222,314,000	Baru
31-05-24	31-05-24	BEN-309113-307753859	00023/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	150,125,000	72,189,000	Baru
31-05-24	31-05-24	BEN-309113-307753382	00022/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	143,662,500	71,473,500	Balik
31-05-24	31-05-24	BEN-309113-307754270	00022/PKB/309113/2024	005042300309113	071	143,622,500	0	72,149,000	Baru
30-06-24	30-06-24	BEN-309113-315751639	00024/PKB/309113/2024	005042300309113	071	150,439,500	0	222,588,500	Baru
30-06-24	30-06-24	BEN-309113-315753755	00025/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	180,015,000	42,573,500	Baru

BUKU BESAR SAI
TINGKAT SATUAN KERJA
PEMBUKUAN DASAR AKRUAL
PER 1 JANUARI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : BBSAIS
Tanggal : 04-01-2025
Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON 1 :04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI :2300 Pengadilan Tinggi Agama Mataram
SATUAN KERJA :309113 PENGADILAN AGAMA BIMA
JENIS KEWENANGAN :KD Kantor Daerah

BUKU BESAR 111825 Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

TGL JNL	TGL DOK	KD BUKU BESAR	NO DOK	BAESWILSATK	KPPN	DEBET	KREDIT	SALDO	TIPE JURNAL
31-07-24	31-07-24	BEN-309113-327647622	00026/PKB/309113/2024	005042300309113	071	214,477,500	0	257,051,000	Baru
31-07-24	31-07-24	BEN-309113-327649514	00027/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	215,015,000	42,036,000	Baru
31-08-24	31-08-24	BEN-309113-339113296	00028/PKB/309113/2024	005042300309113	071	191,169,500	0	233,205,500	Baru
31-08-24	31-08-24	BEN-309113-339117957	00029/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	190,125,000	43,080,500	Baru
30-09-24	30-09-24	BEN-309113-349693211	00030/PKB/309113/2024	005042300309113	071	347,177,000	0	390,257,500	Baru
30-09-24	30-09-24	BEN-309113-349696920	00031/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	200,030,000	190,227,500	Baru
31-10-24	31-10-24	BEN-309113-361681833	00032/PKB/309113/2024	005042300309113	071	224,586,916	0	414,814,416	Baru
31-10-24	31-10-24	BEN-309113-361683954	00033/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	190,015,000	224,799,416	Baru
11-12-24	30-11-24	BEN-309113-379196803	00034/PKB/309113/2024	005042300309113	071	140,604,000	0	365,403,416	Baru
11-12-24	30-11-24	BEN-309113-379197181	00035/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	150,015,000	215,388,416	Baru
31-12-24	31-12-24	BEN-309113-388050735	00036/PKB/309113/2024	005042300309113	071	38,108,000	0	253,496,416	Baru
31-12-24	31-12-24	BEN-309113-388053337	00037/PKB/309113/2024	005042300309113	071	0	100,015,000	153,481,416	Baru
31-12-24	31-12-24	GLP-309113-389622044	A001	005042300309113	071	0	153,481,416	0	Baru
						5,408,549,780	5,408,549,780	0	

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 03/01/25 1:42 AM
Tgl Cetak : 03/01/25 9:17 AM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	153,481,416	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	9,897,312	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	153,481,416
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	251,700,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	173,848,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	8,320,000
0.0	391111	Ekuitas	0	6,483,640
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	64,705,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	109,143,500
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	96,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,500,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	134,700,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	19,906,328	0
JUMLAH			593,833,556	593,833,556

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

BIMA, 3 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

USMAN
NIP 196612311997031021

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Provinsi/Kabupaten/Kot : (23.06) NUSA TENGGARA BARAT / KAB. DOMPU
Satuan Kerja : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA
Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-005.04.2.309113/2024
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (071) Bima
Alamat dan No Telp :

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 153.481.416,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00037/PKB/309113/2024

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	215.388.416,00	45.821.000,00	107.728.000,00	153.481.416,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	215.388.416,00	45.821.000,00	107.728.000,00	153.481.416,00
B.	BP Selain Kas	215.388.416,00	45.821.000,00	107.728.000,00	153.481.416,00
	1. BP PNPB	0,00	7.713.000,00	7.713.000,00	0,00
	2. BP DPK	215.388.416,00	38.108.000,00	100.015.000,00	153.481.416,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00 ^(*)
3.	Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	153.481.416,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00 ^(*)
3.	Selisih Kas	Rp	153.481.416,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	7.713.000,00 ^(*)
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	7.713.000,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	7.713.000,00 ^(*)
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	7.713.000,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	7.713.000,00
3. Selisih	Rp	0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 153.481.416,00-
- 2. Selisih Pembukuan (V.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



USMAN
NIP 196612311997031021

KAB. DOMPU , 31 Desember 2024

Bendahara Penerimaan



TRIYONO

NIP 198810022020121003

BERITA ACARA REKONSILIASI RPL
NOMOR BAR : 012/BPN-RP GPL.309113/XII/2024

Pada Hari Selasa Tanggal 31 Desember 2024, telah diselenggarakan Rekonsiliasi Saldo RPL pada satuan Kerja Pengadilan Agama Bima (309113) periode bulan Desember 2024. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut :

I. Rekonsiliasi antara Rekening Koran RPL (Kasir) dengan Buku Pembantu Bank (Bendahara Penerimaan)

No	Informasi Rekening RPL	Saldo Akhir Bulan pada Rekening Koran RPL	Saldo Akhir Bulan pada Buku Pembantu Bank	Selisih
1	Nomor Rekening : 7261759467 Nama Rekening : RPL 071 PS PA BIMA BIAYA PERKARA Nama Bank : Bank Syariah Indonesia Nomor Surat Izin Rekening : 000291/071	153.481.416	153.481.416	0

Penjelasan atas Selisih :

II. Rekonsiliasi antara Rekening Koran RPL (Kasir) dengan Buku Besar Akrual Akun Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan 111825 (Operator GLP)

No	Informasi Rekening RPL	Saldo Akhir Bulan pada Rekening Koran RPL	Saldo Akhir Bulan pada Buku Besar Akrual Akun Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)	Selisih
1	Nomor Rekening : 7261759467 Nama Rekening : RPL 071 PS PA BIMA BIAYA PERKARA Nama Bank : Bank Syariah Indonesia Nomor Surat Izin Rekening : 000291/071	153.481.416	153.481.416	0

Penjelasan atas Selisih :

Hasil Rekonsiliasi dituangkan ke dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima kode satker 309113 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti semua pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Kasir

Nabillah Puspita
Cahayarini, A.Md.M.I.D.
NIP. 199611092020122004

Bendahara Penerimaan

Triyono, A.Md.
NIP.198810022020121003

Operator GLP

Rezky Puspitarani, S.E
NIP.199404032020122016

Kuasa Pengguna Anggaran

Usman, S.Ag.
NIP.196612311997031021

Mengetahui,



Panitera

Drs. H. Ikhlās
NIP.196812311993031042

RPL 071 PS PA BIMA BIAYA PERKARA / IDR

Account : 7261759467
Date : 01 Dec 2024 - 31 Dec 2024
Opening Balance : IDR 215,388,416.00
Closing Balance : IDR 153,481,416.00
Total Debit Amount : IDR -100,015,000.00
Total Debit Record : 3
Total Credit Amount : IDR 38,108,000.00
Total Credit Record : 48
Branch : ID0010309

Date	FT Number	Description	Currency	Amount	DB	CR	Balance
2024-12-02 06:59:59	FT24337SNB72\BNK	MB BPI 6008952241201001 Trf Dari - GAMAL SETIA PUTRA	IDR	505,000.00		CR	215,893,416.00
2024-12-02 07:01:03	FT24337TC67B\BNK	MB BPI 6008952241201002 Trf Dari - GAMAL SETIA PUTRA	IDR	657,500.00		CR	216,550,916.00
2024-12-02 09:37:40	FT243371Y4JT	PENCAIRAN CEK AN NABILLAH PUSPITA	IDR	50,000,000.00	DB		166,550,916.00
2024-12-02 12:35:56	FT24337F3K10\M68	TAMBAHAN	IDR	240,000.00		CR	166,790,916.00
2024-12-02 14:20:44	FT24337D3BYL\BNK	Pemindahbukuan Trf Dari - SRI RAHMAWATI	IDR	465,000.00		CR	167,255,916.00
2024-12-03 09:51:35	FT24338ZGJGF\BNK	Pemindahbukuan Trf Dari - GAMAL SETIA PUTRA	IDR	185,000.00		CR	167,440,916.00
2024-12-03 11:13:35	FT2433853454\BNK	Pemindahbukuan Trf Dari - GAMAL SETIA PUTRA	IDR	500,000.00		CR	167,940,916.00
2024-12-04 09:08:12	FT24339H5069\BNK	Pemindahbukuan Trf Dari - GAMAL SETIA PUTRA	IDR	170,000.00		CR	168,110,916.00
2024-12-05 21:49:41	FT24340F44GT\BNK	MB BPI 6008952241205001 Trf Dari - IMAM MUHAJIR	IDR	657,500.00		CR	168,768,416.00
2024-12-08 14:22:21	FT243431M44L\BNK	ATM BPI 6008952241208001 Trf Dari - 008 - MUAMAR HALIM	IDR	505,000.00		CR	169,273,416.00
2024-12-09 09:04:17	FT24344XHC LZ\BNK	MB BPI 6008952241209002 Trf Dari - RUWAIDAH	IDR	657,500.00		CR	169,930,916.00
2024-12-09 11:57:48	FT24344FHODP\BNK	Pemindahbukuan Trf Dari - GAMAL SETIA PUTRA	IDR	375,000.00		CR	170,305,916.00
2024-12-09 12:12:38	FT24344HW2F2\BNK	MB BPI 6008952241209003 Trf Dari - GAMAL SETIA PUTRA	IDR	685,000.00		CR	170,990,916.00
2024-12-09 13:13:21	FT2434486GJ3	BIFAST - TRF Dari - Bank BRI FLIPTECH LENTERA INS FLP729604029	IDR	445,000.00		CR	171,435,916.00
2024-12-09 13:41:30	FT2434456F35	BIFAST - TRF Dari - Bank NTB Syariah FITRIANI BIFAST 128 0130227045756 To 92451 7	IDR	900,000.00		CR	172,335,916.00
2024-12-09 14:51:10	FT24344PRWRZ\BNK	ATM BPI 6008952241209004 Trf Dari - 009 - IBU ST FADILLAH	IDR	512,500.00		CR	172,848,416.00
2024-12-10 10:15:32	FT24345WX3RR\BNK	Pemindahbukuan Trf Dari - GAMAL SETIA PUTRA	IDR	420,000.00		CR	173,268,416.00
2024-12-10 10:56:46	FT24345MY8W0\BNK	Pemindahbukuan Trf Dari - GAMAL SETIA PUTRA	IDR	370,000.00		CR	173,638,416.00
2024-12-11 08:37:46	FT24346VD8LZ	BIFAST - TRF Dari - Bank BRI RAHMAWATI	IDR	212,000.00		CR	173,850,416.00
2024-12-11 11:03:13	FT24346ZRFHR\BNK	PS perkara 1368 Trf Dari - SUMANTRI	IDR	2,130,000.00		CR	175,980,416.00
2024-12-11 11:36:07	FT24346WLK71\BNK	Pemindahbukuan Trf Dari - GAMAL SETIA PUTRA	IDR	2,130,000.00		CR	178,110,416.00
2024-12-11 15:30:57	FT24346XK3RC\BNK	MB BPI 6008952241211001 Trf Dari - SAMAN HUDI TESTINGGU LARANGGA	IDR	657,500.00		CR	178,767,916.00
2024-12-13 08:49:00	FT24348VVTK9\BNK	Pemindahbukuan Trf Dari - RUWAIDAH	IDR	6,720,000.00		CR	185,487,916.00
2024-12-13 09:49:35	FT24348C1C0X\O63	BY PERKARA AN KHAIRUNAS	IDR	1,850,000.00		CR	187,337,916.00
2024-12-16 09:43:16	FT243517FBNK\BNK	Pemindahbukuan Trf Dari - GAMAL SETIA PUTRA	IDR	30,000.00		CR	187,367,916.00
2024-12-16 10:39:40	FT24351DL63Y\BNK	Pemindahbukuan Trf Dari - GAMAL SETIA PUTRA	IDR	200,000.00		CR	187,567,916.00
2024-12-16 10:40:08	FT243514WD55\BNK	Pemindahbukuan Trf Dari - GAMAL SETIA PUTRA	IDR	30,000.00		CR	187,597,916.00
2024-12-17 10:54:56	FT243524SKVL\BNK	ATM BPI 6008952241217001 Trf Dari - 009 - BPK TAUFIQUEURRAHMAN	IDR	465,000.00		CR	188,062,916.00
2024-12-17 13:14:20	FT24352GPX86	BIAYA PS 1397	IDR	4,520,000.00		CR	192,582,916.00
2024-12-17 13:14:52	FT24352L1P4B	PENCAIRAN CEK AN NABILLAH	IDR	50,000,000.00	DB		142,582,916.00
2024-12-18 06:54:22	FT24353P2VCM\BNK	ATM BPI 6008952241218001 Trf Dari - 009 - BPK BAHARUDIN	IDR	657,500.00		CR	143,240,416.00
2024-12-18 10:54:10	FT2435332094	BIFAST - TRF Dari - Bank BRI RAHMAWATI	IDR	202,000.00		CR	143,442,416.00
2024-12-20 15:18:17	FT24355DPN8D\BNK	ATM BPI 6008952241220001 Trf Dari - 009 - BPK AMIRUDDIN	IDR	465,000.00		CR	143,907,416.00
2024-12-23 12:37:40	FT24358SCNLZ	BIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri ULFAH Lainnya	IDR	185,000.00		CR	144,092,416.00
2024-12-23 13:41:12	FT2435834Y61	BIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri ITA FAURISTI Lainnya	IDR	165,000.00		CR	144,257,416.00
2024-12-24 09:34:36	FT2435919R9Q\BNK	Pemindahbukuan Trf Dari - GAMAL SETIA PUTRA	IDR	125,000.00		CR	144,382,416.00
2024-12-24 12:58:07	FT243599JKL0	BIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri DWI SARTIKA HARYATI Tambahan Panjar 1776	IDR	1,255,000.00		CR	145,637,416.00
2024-12-26 07:40:37	FT24361GRFMJ\BNK	ATM BPI 6008952241226001 Trf Dari - 009 - BPK BAHARUDIN	IDR	657,500.00		CR	146,294,916.00
2024-12-26 21:14:24	FT243611K75P\BNK	MB BPI 6008952241226002 Trf Dari - JULQIFLIYIN	IDR	657,500.00		CR	146,952,416.00
2024-12-26 22:11:35	FT24361WJX88\BNK	MB BPI 6008952241226003 Trf Dari - JULQIFLIYIN	IDR	465,000.00		CR	147,417,416.00
2024-12-26 22:51:57	FT24361J5XDM\BNK	MB BPI 6008952241226004 Trf Dari - JULQIFLIYIN	IDR	657,500.00		CR	148,074,916.00
2024-12-27 23:38:32	FT243624THDD\BNK	MB BPI 6008952241226005 Trf Dari - JULQIFLIYIN	IDR	657,500.00		CR	148,732,416.00
2024-12-27 09:47:41	FT2436253TCT	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI ATIS IKA ERNAWATI Tambahan Panjar Biaya Perkara 1031	IDR	99,000.00		CR	148,831,416.00
2024-12-27 16:28:27	FT24362PR5FH\BNK	ATM BPI 6008952241227001 Trf Dari - 009 - BPK AGUS HARTAWAN FIRMANSYAH	IDR	745,000.00		CR	149,576,416.00
2024-12-30 09:24:50	FT243655TPM6\BNK	MB BPI 6008952241229001 Trf Dari - GAMAL SETIA PUTRA	IDR	657,500.00		CR	150,233,916.00
2024-12-30 11:28:54	FT24365CMBGR\BNK	Pemindahbukuan Trf Dari - GAMAL SETIA PUTRA	IDR	760,000.00		CR	150,993,916.00
2024-12-31 12:18:26	FT24366G6Z11\BNK	ATM BPI 6008952241231001 Trf Dari - 009 - BPK BAHARUDIN	IDR	657,500.00		CR	151,651,416.00
2024-12-31 14:56:58	FT24366Z8Q0S	tambahan panjar perkara no 1372 Trf Dari - SAMAN HUDI TESTINGGU LARANGGA	IDR	530,000.00		CR	152,181,416.00
2024-12-31 18:33:33	FT24366B90R5\BNK	ATM BPI 6008952241231002 Trf Dari - 535 - MUHAMMAD BAHRUL ULUM	IDR	657,500.00		CR	152,838,916.00
2024-12-31 18:55:35	FT24366YGJ3X\BNK	ATM BPI 6008952241231003 Trf Dari - 535 - MUHAMMAD BAHRUL ULUM	IDR	657,500.00		CR	153,496,416.00
2024-12-31 21:51:15	7261759467.73.20241231	Biaya Administrasi	IDR	15,000.00	DB		153,481,416.00

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Nomor: B001

Kementerian/ Lembaga : MAHKAMAH AGUNG RI
Eselon I : BADAN PERADILAN AGAMA
Wilayah : PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM - NUSA TENGGARA BARAT
Satuan Kerja : PENGADILAN AGAMA BIMA
No. Dokumen : B001
Tanggal/ Periode : 2 Januari 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal Manual Migrasi Saldo Awal Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Kategori Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima Dimuka	☐	Koreksi antar beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi
☐	Beban dibayar dimuka	☐	Beban selisih kurs yang belum terealisasi
☐	Beban yang masih harus dibayar	☐	Pembentukan piutang jangka panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pendapatan Aset Tetap
☐	Penghapusan Piutang	☐	Pembentukan Piutang jangka pendek
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Masuk
☒	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	☐	Transfer Keluar
☐	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Persediaan	☐	Koreksi

Kode Akun	Uraian Nama Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	73,414,716	-
212192	Dana Pihak Ketiga	-	73,414,716

Dibuat Oleh: PPK
Tanggal: 2-1-2024



(NAJIR, S.Ag.)
NIP. 197606072001121003

Disetujui Oleh: KPA
Tanggal: 2-1-2024



(HUSNINAS, S.Ag.)
NIP. 196903132003121002

Direkam Oleh: Operator
Tanggal: 2-1-2024



(REZKY PUSPITARANI, S.E.)
NIP. 199404032020122016

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Nomor: A001

Kementerian/ Lembaga : MAHKAMAH AGUNG RI
Eselon I : BADAN PERADILAN AGAMA
Wilayah : PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM - NUSA TENGGARA BARAT
Satuan Kerja : PENGADILAN AGAMA BIMA
No. Dokumen : A001
Tanggal/ Periode : 31 Desember 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal Manual Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Kategori Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima Dimuka	☐	Koreksi antar beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi
☐	Beban dibayar dimuka	☐	Beban selisih kurs yang belum terealisasi
☐	Beban yang masih harus dibayar	☐	Pembentukan piutang jangka panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pendapatan Aset Tetap
☐	Penghapusan Piutang	☐	Pembentukan Piutang jangka pendek
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Masuk
☒	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	☐	Transfer Keluar
☐	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Persediaan	☐	Koreksi

Kode Akun	Uraian Nama Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
212192	Dana Pihak Ketiga	153,481,416	-
111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	153,481,416

Dibuat Oleh: PPK
Tanggal: 31-12-2024

(NAJIR, S.Ag.)
NIP. 197606072001121003



Disetujui Oleh: KPA
Tanggal: 31-12-2024

(HUSMAN, S.Ag.)
NIP. 196612311997031021

Direkam Oleh: Operator
Tanggal: 31-12-2024

(REZKY PUSPITARANI, S.E., S.H.)
NIP. 199404032020122016

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA (04)
PENGADILAN AGAMA BIMA (309113)
Rekening Induk : RKK DITJEN BADILAG O (032901xxxxxx303)
Virtual Account : 651543091131000 | BPG 071 PA BIMA 04
Periode : 01-12-2024 s/d 31-12-2024

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
			Total Mutasi		0,00	0,00			
			Saldo Akhir				0,00		



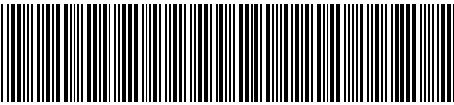
MONITORING KINERJA SATKER

PERIODE : DESEMBER

No	TAH UN_ANG GAR AN	KOD E_B A	NAM A_K EME NTE RIAN	KOD E_ES 1	NAM A_E S1	KOD E_S ATK ER	KOD E_WI LAY AH	NAM A_S ATK ER	NOM OR_ DIPA	KOD E_PE RIOD E	NOM OR_ REVI SI	KOD E_FU NGSI	KOD E_P ROG RAM	KOD E_K EGIA TAN	KOD E_K RO	KOD E_R O	URAI AN_ RO	SAT UAN	TAR GET_ VO LUM E	REA LISA SI_V OLU ME	PRO GRE S_C APAI AN	KET ERA NGA N	PAG U_B ELA NJA PEN GIRI MAN	REA LISA SI_B ELA NJA PEN GIRI MAN	PER SEN _RE ALIS ASI	TGL_ KIRI M_D ATA	TGL_ FLA G_O MSP AN	KOD E_TE MATI K	KOD E_P RIOR ITAS _NA SION AL	KOD E_P RIOR ITAS _NA SION AL DES KRIP SI	PRO GRA M_P RIOR ITAS	PRO GRA M_P RIOR ITAS _DE SKRI PSI	KEGI ATA N_P RIOR ITAS	KEGI ATA N_P RIOR ITAS _DE SKRI PSI	PAG U_TE RAK HIR_ KHU SUS _PE RIOD E_12	REVI SI_T ERA KH USU S_PE RIOD E_12	REA LISA SI_T ERA KH USU S_PE RIOD E_12
1	2024	005	MAH KAM AH A GUN G	04	Ditjen Bada n Per adila n Ag ama	3091 13	2300	PEN GADI LAN AGA MA BIMA	DIPA-005. 04.2. 3091 13/20 24	2024-12	4	03.04	BF	1053	QBA	003	Laya nan Pos Bant uan Huku m di Lingk unga n Per adila n Ag ama	Oran g	1150	1161	100	suda h sel esai	96,00 0,000	96,00 0,000	100	02-J AN-2 5 04. 01.20 .0000 00 PM	02-J AN-2 5 06. 00.21 .0000 00 PM	000-2 024	07-20 24	Mem perku at St abilit as Po lhukh anka m dan T ransf orma si Pel ayan an P ublik	07.03 -2024	Pene gaka n Hu kum Nasio nal			96,00 0,000	4	0
2	2024	005	MAH KAM AH A GUN G	04	Ditjen Bada n Per adila n Ag ama	3091 13	2300	PEN GADI LAN AGA MA BIMA	DIPA-005. 04.2. 3091 13/20 24	2024-12	4	03.04	BF	1053	QCA	001	Perk ara di Lingk unga n Per adila n Ag ama yang disel esai an m elalui pemb ebas	Perk ara	200	204	100	suda h sel esai	84,00 0,000	80,70 0,000	96.07	02-J AN-2 5 04. 01.20 .0000 00 PM	02-J AN-2 5 06. 00.21 .0000 00 PM	000-2 024	07-20 24	Mem perku at St abilit as Po lhukh anka m dan T ransf orma si Pel ayan an P ublik	07.03 -2024	Pene gaka n Hu kum Nasio nal			84,00 0,000	4	0



hal : 2 dari 2 halaman



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 005.04.2.309113/2024

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 04
Tanggal : 08 Oktober 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
- 3. Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
- 4. Kode>Nama Satker : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA
- Sebesar : Rp. 255.000.000 (DUA RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 005.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 005.04.BF.1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Jumlah Uang

Rp. 255.000.000
Rp. 255.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 255.000.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN B I M A (071) Rp. 255.000.000

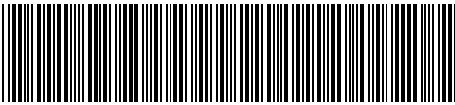
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309113/2024
I A. INFORMASI KINERJA



DS:4601-3118-0595-3273

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA

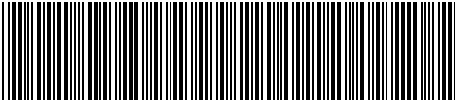
Halaman : I A. 1

Program	:	005.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				255.000.000
Kegiatan	:	1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama				255.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama				
		2. 01	Jumlah administrasi perkara jinayah di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan				
		3. 01	Jumlah kegiatan peningkatan dan pemantauan layanan pengadilan				
		4. 01	Jumlah orang yang dilakukan Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Agama				
		5. 02	Jumlah Pedoman Implementasi Restorative Justice Perkara Jinayah				
		6. 02	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Agama				
		7. 03	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Agama				
		8. 04	Jumlah pemohon perkara yang dilayani melalui sidang terpadu dilingkungan peradilan Agama				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1053.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		1.150,00	Orang	96.000.000
Rincian Output	:	01 QBA.003	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama (PN)		1150.00	Orang	96.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1053.QCA	Perkara Hukum Perseorangan		320,00	Perkara, Berkas Perkara	159.000.000
Rincian Output	:	01 QCA.001	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (PN)		200.00	Perkara	84.000.000
		02 QCA.002	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung (PN)		120.00	Perkara	75.000.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196505141993031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309113/2024
I B. SUMBER DANA



DS:4601-3118-0595-3273

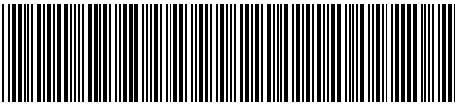
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	255.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	255.000.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309113/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4601-3118-0595-3273

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA
Kewenangan : (KD)

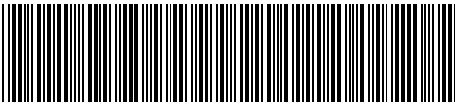
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	-	255.000	-	-	-	255.000	23 . 06	
005.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	255.000	-	-	-	255.000		
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-	255.000	-	-	-	255.000		
1053.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (23.06 NUSA TENGGARA BARAT / KAB. DOMPU)	-	96.000	-	-	-	96.000		
01	RM	-	96.000	-	-	-	96.000	071	
1053.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (23.06 NUSA TENGGARA BARAT / KAB. DOMPU)	-	159.000	-	-	-	159.000	23 . 06	
01	RM	-	159.000	-	-	-	159.000	071	
JUMLAH		-	255.000	-	-	-	255.000		

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196505141993031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309113/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:4601-3118-0595-3273

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode/Nama Satker : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA

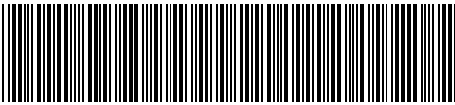
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	309113	PENGADILAN AGAMA BIMA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	20.000	29.600	20.000	20.000	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	14.100	0	3.300	255.000
		BELANJA BARANG	20.000	29.600	20.000	20.000	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	14.100	0	3.300	255.000
		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	20.000	29.600	20.000	20.000	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	14.100	0	3.300	255.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	20.000	29.600	20.000	20.000	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	14.100	0	3.300	255.000
		PERKIRAAN PENERIMAAN	15.755	15.755	15.755	15.755	15.755	15.755	15.755	15.755	15.755	15.755	15.755	15.768	189.073
		- PNBP (425233)	6.016	6.016	6.016	6.016	6.016	6.016	6.016	6.016	6.016	6.016	6.016	6.024	72.200
	005.04.BF.1053	- PNBP (425239)	9.739	9.739	9.739	9.739	9.739	9.739	9.739	9.739	9.739	9.739	9.739	9.744	116.873

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196505141993031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309113/2024
IV A. B L O K I R



DS:4601-3118-0595-3273

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [04] Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : [23] NUSA TENGGARA BARAT
Kode dan Nama Satker : [309113] PENGADILAN AGAMA BIMA

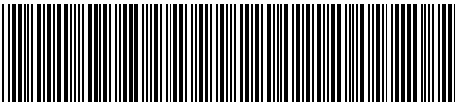
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196505141993031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309113/2024
IV B. C A T A T A N



DS:4601-3118-0595-3273

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [04] Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : [23] NUSA TENGGARA BARAT
Kode dan Nama Satker : [309113] PENGADILAN AGAMA BIMA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196505141993031004

**BERITAACARAPEMERIKSAANKAS
PENGADILAN AGAMA BIMA
PERIODE : 01 DESEMBER 2024 – 31 DESEMBER 2024**

Padahariini,Selasa,Tanggal 31 Desember 2024 Pukul 9:44 WIB yang bertandatangan dibawah ini

Nama : IHYADDIN, S.Ag., M.H
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima

Melakukan pemeriksaan Kas terhadap :

Nama : Drs. H. Ikhlas
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Bima.

Berdasar hasil pemeriksaan keuangan perkara serta bukti-bukti yang ada dalam pengurusan itu, kami menemukan kenyataan sebagai berikut :

I. Saldo Kas (ASET)

1. Uang Tunai	4.398.400
2. Meterai	0
3. Saldo Bank BSI No. Rek Giro 7261759467	153.481.584
Jumlah Aset	157.879.984

II. Saldo Buku (KEWAJIBAN):

A. Saldo Buku Keuangan Perkara :

1. Biaya panjar perkara (L1.PA7.a)	122.360.000
2. Biaya panjar Eksekusi (L1.PA7.b)	12.705.000
3. Biaya panjar Konsignasi (L1.PA7.c)	0
Jumlah A	135.065.000

B. Saldo Buku Bantu :

1. Biaya panggilan dan PBT	1.595.000
2. Uang Iwadl	0
3. Uang Konsinyasi	0
4. Uang Hasil Eksekusi	0
5. Biaya Perkara Belum didaftarDaftar	21.220.000
6. Uang Mut'ah	0
7. Uang Nafkah Iddah	0
8. Biaya ATK Perkara	0
9. Biaya Delegasi	0
10. Uang PNBPFungsional	0
Jumlah B	22.815.000
Jumlah Kewajiban (A+B)	157.880.000

Kesimpulan :

1. Terdapat Selisih Senilai:-16 yang disebabkan oleh tidak adanya pecahan 16 rupiah -16
2. Seluruh transaksi keuangan pada saldo buku dilengkapi dengan bukti transaksi yang sesuai/tidak sesuai*



Yang Diperiksa

Dr. H. Ikhlas

NIP.196812311993031042

Pejabat Yang Memeriksa
Wakil Ketua Pengadilan Agama



IHYADDIN, S.Ag., M.H

NIP.196904171999031003

RINCIAN PEMERIKSAAN KAS PENGADILAN**AGAMA BIMA****PERIODE : 01 DESEMBER 2024 – 31 DESEMBER 2024****I. Saldo Kas (ASET)****A. Kas Tunai**

1.	Pecahan 100.000 sebanyak	43 lembar	=	Rp 4.300.000
2.	Pecahan 50.000 sebanyak	1 lembar	=	Rp 50.000
3.	Pecahan 20.000 sebanyak	2 lembar	=	Rp 40.000
4.	Pecahan 10.000 sebanyak	0 lembar	=	Rp 0
5.	Pecahan 5.000 sebanyak	1 lembar	=	Rp 5.000
6.	Pecahan 2.000 sebanyak	1 lembar	=	Rp 2.000
7.	Pecahan 1.000 sebanyak	1 lembar/ Keping	=	Rp 1.000
8.	Pecahan 500 sebanyak	0 Keping	=	Rp 0
9.	Pecahan 100 sebanyak	4 Keping	=	Rp 400
10.	Pecahan 50 sebanyak	0 Keping	=	Rp 0
Jumlah Kas Tunai				Rp 4.398.400

B. Meterai

1.	Lembaran 3.000 sebanyak	0 lembar	=	Rp 0
2.	Lembaran 6.000 sebanyak	0 lembar	=	Rp 0
3.	Lembaran 10.000 sebanyak	0 lembar	=	Rp 0
Jumlah nilai Meterai				Rp 0

C. Bank

No.	Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo
1.	BSI	7261759467	Rp 153.481.584
Jumlah nilai Meterai			Rp 153.481.584



Yang Diperiksa

Drs. H. Ikhlas

NIP. 196812311993031042

Pejabat Yang Memeriksa
Wakil Ketua Pengadilan Agama

HY ADDIN, S.Ag., M.H

NIP. 196904171999031003